

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia sangat perlu untuk terus melakukan pembangunan negara di segala aspek. Secara massif pembangunan nasional tentunya membutuhkan dana yang cukup agar dapat terciptanya pembangunan yang merata. Dalam melaksanakan pembangunan dihadapkan pada berbagai pilihan sumber pembiayaan. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat itu sendiri dan pembangunan infrastruktur serta prasarana negara yang terdapat dalam APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Menurut Resmi (2017: 1), "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*". Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai Wajib Pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain serta pemungutannya dilakukan secara periodik atau berlaku. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan apabila terjadi suatu transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutannya, pajak memiliki aturan yang jelas dan dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 mengemukakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi 11 barang dan jasa, didalam daerah Pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.” Pengertian pajak menurut Halim (2014:23) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri.

Penyetoran PPN dilakukan melalui SSP (Surat Setor Pajak), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPTMasa PPN). SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm atas Penjualan yang dikenakan PPN, serta untuk mengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Mengacu pada undang - undang No.42 tahun 2009, perusahaan wajib menyetorkan PPN sesuai dengan nilai penjualan barang dan jasa yang diakui, namun masih ada perusahaan yang salah atau menyalahi undang - undang dalam mengakui nilai penjualan barang atau jasa baik disengaja maupun tidak di sengaja. Bila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam melapor dan menyetorkan nilai PPN yang seharusnya, maka perusahaan akan mendapatkan denda ataupun sanksi, maka dari itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melapor dan menyetorkan nilai PPN yang akan di bayar maka dapat dilakukan ekualisasi PPN.

Ekualisasi merupakan perbandingan antara laba rugi yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT. Masa PPh Pasal 26 dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Ekualisasi menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan. Hal ini dimaksud agar dapat diketahui perbedaan yang ada antara SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN

pada PT. Cahaya Murni Sriwindo. Menurut Mardiasmo, (2016:22), “Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

PT. Cahaya Murni Sriwindo Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri *furniture* atau mebel yang didirikan pada tahun 1981. Produk yang dihasilkan yaitu furniture berupa kursi plastik, springbed, busa, panel, dan sofa. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Cahaya Murni Sriwindo tentunya melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPN dan wajib melaporkan serta mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN tersebut melalui surat pemberitahuan masa (SPTMasa PPN). Berikut adalah tabel perbandingan antara Penyerahan BKP/JKP dan Perolehan BKP/JKP berdasarkan SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN tahun 2022.

Tabel 1.1
PT Cahaya Murni Sriwindo
Perbandingan Peredaran Usaha SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN
di Tahun 2022

Keterangan	SPT Tahunan Badan 2022	SPT Masa PPN 2022	SELISIH
Penjualan atau Penyerahan BKP/JKP	Rp142.557.738.501,41	Rp142.650.392.549,00	Rp92.654.047,59

(Sumber : Data Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat adanya perbedaan jumlah peredaran usaha yang tersaji antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN. Dari perbedaan tersebut menyebabkan selisih antara SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN sebesar Rp92.654.047,59. Dasar Pengenaan Pajak pada PPN Keluaran seharusnya memiliki nilai yang sama dengan jumlah Penjualan pada SPT Tahunan Badan. Selisih inilah yang menjadi objek dalam melakukan ekualisasi antara SPT Masa PPN dengan SP Tahunan Badan, proses ekualisasi akan

menghasilkan keterangan mengenai penyebab timbulnya perbedaan tersebut serta mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan. Terjadinya selisih pada ekualisasi dapat disebabkan oleh adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembatalan, ditemukannya penghasilan PPh badan yang ternyata bukanlah objek PPN, DPP PPN tidak termasuk dalam PPh badan, adanya selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan faktur pajak serta pembayaran uang muka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan mengambil judul **“ANALISIS EKUALISASI PENJUALAN MENURUT SPT MASA PPN DENGAN SPT TAHUNAN BADAN PADA PT CAHAYA MURNI SRIWINDO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu :

1. Apa yang menyebabkan perbandingan antara peredaran usaha SPT Tahunan Badan dengan peredaran usaha SPT Masa PPN ?
2. Apa dampak yang diakibatkan dari perbedaan antara peredaran usaha SPT Tahunan Badan dengan peredaran usaha SPT Masa PPN ?
3. Bagaimana strategi perbaikan yang dilakukan agar tidak terdapat perbedaan peredaran usaha SPT Tahunan Badan dengan peredaran usaha SPT Masa PPN ?

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat masalah pokok yang dihadapi oleh PT Cahaya Murni Sriwindo yaitu bagaimana analisis ekualisasi Penyerahan BKP di SPT Tahunan Badan dengan di SPT Masa PPN, bagaimana analisis ekualisasi BKP di SPT Tahunan Badan dengan di SPT Masa PPN, dan apa yang menyebabkan perbedaan antara SPT Tahunan Badan dengan di SPT Masa PPN terkait penjualan dan pembelian BKP, sehingga dibutuhkannya analisis ekualisasi penjualan dan pembelian BKP di SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN dengan tujuan agar dapat mengetahui penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan ruang lingkup dalam pembahasan laporan akhir ini dilakukan agar memiliki gambaran yang jelas dan tidak menyimpang terhadap permasalahan yang di bahas, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada ekualisasi penjualan menurut SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN pada PT Cahaya Murni Sriwindo tahun 2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan antara Perhitungan SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN terkait penjualan pada PT Cahaya Murni Sriwindo.
2. Untuk mengetahui apa dampak yang diakibatkan dari perbedaan antara peredaran usaha SPT Tahunan Badan dengan peredaran usaha SPT Masa PPN.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi perbaikan yang dilakukan agar tidak terdapat perbedaan peredaran usaha SPT Tahunan Badan dengan peredaran usaha SPT Masa PPN.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Perusahaan,
Laporan akhir ini diharapkan penulis dapat digunakan sebagai bahan informasi khususnya bagian akuntansi (perpajakan) perusahaan dalam melakukan hal perhitungan PPN dan memberikan motivasi bagi perusahaan.
2. Bagi Penulis
Penulis berharap penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teori perpajakan yang telah diperoleh dibangku kuliah kedalam praktek perpajakan yang ada didalam perusahaan.

3. Bagi Lembaga

Penulis berharap agar laporan akhir ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan bahan referensi serta pembanding dalam melakukan penulisan lebih lanjut dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan akhir ini tentunya dibutuhkan data yang akurat, objektif dan mendukung analisis terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di perusahaan. Menurut Sugiyono (2018:2), Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview), merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan kunjungan dan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.
2. Pengamatan (Observasi), merupakan suatu proses pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang atau organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke perusahaan PT Cahaya Murni Sriwindo, melakukan wawancara dengan pegawai PT Cahaya Murni Sriwindo untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan, dan melakukan dokumentasi terkait catatan peristiwa yang sudah berlalu.

1.6 Sumber Data Penulisan

Menurut Sugiyono (2016:308), sumber data penulisan dibagi menjadi dua sumber , yaitu :

1. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber data yang langsung dan memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Berdasarkan uraian mengenai sumber data yang telah dijelaskan di atas, dalam penyusunan Laporan Akhir penulis menggunakan sumber data primer, yaitu sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan didapat dan diberikan langsung oleh perusahaan.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, tiap-tiap bab memiliki hubungan antar bab satu dengan lain. Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi laporan akhir ini, penulis menggambarkan sistematika ini secara singkat, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup permasalahan dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Teori-teori yang akan diuraikan mengenai perpajakan mulai dari pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, pengertian ekualisasi perpajakan, pengertian PPN, pengertian PPN keluaran dan PPN masukan, subjek dan objek PPN, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, SPT Masa, dan SPT Masa PPN.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab tiga penulis menguraikan tentang kondisi umum mengenai keadaan PT Cahaya Murni Sriwindo, yang meliputi sejarah

singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi misi perusahaan, mekanisme perhitungan PPN yang dilakukan perusahaan, laporan laba rugi tahun 2022, serta rekap pembelian dan penjualan tahun 2022.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bagian pembahasan penulis akan menjelaskan data-data yang diperoleh dari perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Bab ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir karena penulis akan membahas permasalahan yang terjadi yaitu mengenai analisis ekualisasi penjualan dan pembelian BKP terhadap SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN. Penulis akan melakukan analisis terhadap data-data yang ada pada perusahaan dibab tiga dengan teori-teori yang ada pada bab dua.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran adalah bab terakhir dalam penyusunan laporan akhir. Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik simpulan berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan, hasil evaluasi terhadap data dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang membangun guna perkembangan perusahaan.